

IMPLEMENTASI EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF ULAMA DAN HAK ASASI MANUSIA

Sri Warjiyati | UIN Sunan Ampel
warjiyatistri@gmail.com | Jl. A. Yani 117 Surabaya, Indonesia

Abstract: Euthanasia is a problematical issue among doctors, legal practitioners, and religious scholars. It has become a topic of discussion in various countries, especially Indonesia and Malaysia when viewed from the perspective of religion and human rights. The scholars agree that an action can only be classified as a Jarimah if the action is strictly prohibited by syara'. Although there is no clarity or certainty in determining whether euthanasia is a crime or not, the concept of euthanasia itself, formulated by experts, is written and is prohibited in the Al-Quran and Hadith. For example in the Al-Qur'an in QS. Al-An'am verse 151: "And do not kill the soul that Allah has haraam (kills it) but with the right cause". Killing here means killing in any way, including killing with the help of others, such as the concept of active euthanasia. Meanwhile, from a human rights perspective, euthanasia is an effort to eliminate the right to life of a human being, because the nature of euthanasia itself eliminates human life because it will harm others.

Keywords: Euthanasia, Scholars, Human Rights, Islamic Law.

Abstrak: Euthanasia merupakan persoalan yang cukup dilematik baik kalangan dokter, praktisi hukum, maupun kalangan agamawan dan menjadi pembahasan diberbagai negara khususnya Indonesia dan Malaysia, terutama apabila ditinjau dari perspektif ulama dan hak asasi manusia. Para ulama' sepakat bahwa suatu perbuatan barulah digolongkan sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut tegas dilarang oleh syara'. Meskipun di dalam hukum Islam belum ada kejelasan atau ketidakpastian dalam menentukan apakah euthanasia termasuk jarimah atau bukan. Konsep euthanasia yang dirumuskan para ahli, sebenarnya ditemukan pula larangannya dalam Al-Quran dan Hadits. Misalnya dalam Al-Qur'an pada QS. Al-An'am ayat 151: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu sebab yang benar". Membunuh disini diartikan membunuh dengan cara apapun termasuk membunuh dengan bantuan orang lain seperti

konsep euthanasia aktif. Sedangkan dalam perspektif hak asasi manusia, euthanasia merupakan usaha untuk menghilangkan hak hidup manusia, karena hakikat euthanasia sendiri itu menghilangkan nyawa manusia dengan alasan akan merugikan orang lain.

Kata kunci: Euthanasia, Ulama, Hukum Islam, Hak Asasi Manusia.

Pendahuluan

Kematian merupakan suatu proses yang tidak dapat ditunda, namun kebanyakan orang tidak menghendaki bila kematian itu datang dengan segera. Kebanyakan orang berharap agar kematian tidak muncul dengan tiba-tiba. Orang bukan hanya saja ngeri menghadapi kematian itu sendiri, namun jauh lebih dari itu, orang ngeri menghadapi keadaan setelah kematian terjadi. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan. Setelah kematian, tubuh makhluk hidup mengalami pembusukan. Kematian, pada umumnya dianggap sebagai suatu hal yang sangat menakutkan, namun akan dialami oleh setiap orang.

Manusia sebagai salah satu ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dilengkapi dengan akal, pikiran dan rasa. Dengan menggunakan akal dan pikirannya tersebut manusia mampu menciptakan teknologi untuk mempermudah dalam hal menjalankan aktifitasnya sehari-hari, maka dari sinilah manusia terus-menerus berusaha menunda kematian dengan berbagai cara, termasuk didalamnya temuan sains dan teknologi untuk menyembuhkan kesehatan manusia, tetapi sebaliknya, dengan adanya penemuan-penemuan sains dan teknologi tersebut, membawa suatu konsekuensi tertentu kepada ummat manusia seperti euthanasia.¹ Euthanasia sebenarnya bukanlah merupakan

¹ Haryadi, "Euthanasia dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Perspektif* XVIII, no. 2 (Mei 2013): 118.

suatu persoalan yang baru bahkan euthanasia telah wujud sejak zaman Yunani purba lagi.²

Euthanasia merupakan suatu persoalan yang cukup dilematik baik di kalangan dokter, praktisi hukum, maupun kalangan agamawan. Di Indonesia masalah ini juga pernah dibicarakan, seperti yang dilakukan oleh pihak Ikatan Dokter Indonesia (yang selanjutnya disebut IDI) dalam seminarnya pada tahun 1985 yang melibatkan para ahli kedokteran, ahli hukum positif dan ahli hukum Islam, akan tetapi hasilnya masih belum ada kesepakatan yang bulat terhadap masalah tersebut.³

Istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu dan thanatos. Kata eu berarti baik, tanpa penderitaan dan thanatos berarti mati. Istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu dan thanatos. Kata eu berarti baik, tanpa penderitaan dan thanatos berarti mati, maka dari itu dalam mengadakan euthanasia arti sebenarnya bukan untuk menyebabkan kematian, akan tetapi untuk mengurangi atau meringankan penderitaan orang yang sedang menghadapi kematiannya. Dalam artiyang demikian itu euthanasia tidaklah bertentangan dengan panggilan manusia untuk mempertahankan dan memperkembangkan hidupnya, sehingga tidak menjadi persoalan dari segi kesusilaan. Artinya, dari segi kesusilaan dapat dipertanggungjawabkan bila orang yang bersangkutan menghendakinya.⁴

Berbagai pengertian tentang euthanasia, diantaranya adalah:

1. Euthanasia adalah perbuatan mengakhiri kehidupan seseorang untuk menghentikan penderitaannya.
2. Euthanasia adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang untuk mati dengan tenang atas permintaannya sendiri.

² Farahwahida Mohd Yusof, "Hanasia: Melanggar Etika dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Teknologi* 64, no. 1 (2013): 35.

³ Haryadi, "Euthanasia dalam Perspektif Hukum Pidana," 119.

⁴ H. Rahmat, "Euthanasia (suntik mati) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Supremasi Hak Asasi Manusia" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012), 37.

3. Euthanasia adalah kesengajaan, baik dengan tindakan aktif ataupun pasif, mengakhiri kehidupan oleh orang lain atas permintaan yang bersangkutan.
4. Dalam ilmu kedokteran, kata euthanasia dipergunakan dalam tiga arti, yaitu:
 - a. Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan, buat yang beriman dengan menyebut nama Allah di bibir.
 - b. Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikan obat penenang.
 - c. Mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.⁵

Indonesia memang belum mengatur secara spesifik dan tegas mengenai masalah euthanasia dan hal ini masih menjadi perdebatan pada beberapa kalangan yang menyetujui tentang euthanasia dan pihak yang tidak setuju tentang hal tersebut. Pihak yang menyetujui tindakan euthanasia beralasan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan hak untuk mengakhiri hidupnya dengan segera dan hal ini dilakukan dengan alasan yang cukup mendukung, yaitu alasan kemanusiaan. Dengan keadaan pasien yang tidak lagi memungkinkan untuk sembuh atau bahkan hidup, maka ia dapat melakukan permohonan untuk segera diakhiri hidupnya. Sementara sebagian pihak yang tidak memperbolehkan euthanasia beralasan bahwa setiap manusia tidak memiliki hak untuk mengakhiri hidupnya karena masalah hidup dan mati adalah kekuasaan mutlak Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. Secara umum, argumen pihak anti euthanasia adalah kita harus mendukung seseorang untuk hidup, bukan menciptakan struktur yang mengizinkan mereka untuk mati.

Ditinjau dari sudut perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya, euthanasia terdiri atas:

1. Euthanasia pasif (*euthanasia indirect*)

⁵ Nur Hayati, "Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kaitannya Dengan Hukum Pidana," *Lex Jurnalica* 1, no. 2 (2004): 17956.

Euthanasia pasif adalah euthanasia yang dilakukan dengan membiarkan seseorang untuk meninggal dengan cara menghentikan atau tidak memberikan perawatan yang dapat memperpanjang hidupnya.

2. Euthanasia aktif (*mercy killing*)

Euthanasia aktif adalah euthanasia yang dilakukan dengan melakukan suatu tindakan secara sengaja dimana telah disadari bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kematian seseorang.

Ditinjau dari sudut korban, maka euthanasia dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Euthanasia sukarela (*voluntary euthanasia*)

Euthanasia sukarela merupakan kematian yang diminta seseorang secara sukarela. Permintaan tersebut biasanya timbul karena korban menderita penyakit yang menimbulkan nyeri tak tertahankan dan penyakit itu sendiri tidak dapat disembuhkan. Dalam hal ini, mereka tidak dapat bunuh diri karena alasan-alasan tertentu. Untuk itu mereka meminta kepada seseorang untuk mengakhiri hidupnya.

2. Euthanasia diandaikan (*non voluntary euthanasia*)

Euthanasia diandaikan merupakan kematian yang tidak diminta secara tegas oleh korban. Dalam hal ini korban dianggap atau diandaikan akan memilih atau meminta mati jika ia dapat menyatakan keinginannya.

3. Euthanasia dipaksakan (*in voluntary euthanasia*)

Euthanasia dipaksakan merupakan pembunuhan yang dilakukan terhadap pasien yang dalam kondisi sadar untuk menentukan kemauannya, tetapi pembunuhan tersebut dilakukan tanpa persetujuannya.⁶

Euthanasia ditinjau dari aspek hukum pidana di Indonesia Sampai sejauh ini Indonesia memang belum mengatur secara spesifik dan jelas mengenai euthanasia (*mercy killing*). Menurut

⁶ Arifin Rada, "Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam," *Perspektif* 18, no. 2 (2013): 108–117.

pengertian kedokteran forensik, euthanasia adalah salah satu bentuk pembunuhan, dimana seseorang dimatikan dengan maksud untuk mengakhiri penderitaan orang tadi.⁷ Ada beberapa pasal yang berkaitan atau dapat menjelaskan dasar hukum dilakukannya euthanasia bagi orang atau keluarga yang mengajukan untuk dilakukan euthanasia:

1. Pasal 340 KUHP, yang berbunyi: "Barang siapa yang dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara selama-lamanya seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun."
2. Pasal 359, yang berbunyi: "Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun."
3. Pasal 345, yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya itu jadi bunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun penjara."

Berdasarkan penjelasan pandangan hukum pidana di Indonesia terhadap tindakan euthanasia dalam skenario ini, maka dokter dan keluarga yang memberikan izin dalam pelaksanaan tindakan tersebut dapat dijeratkan dengan pasal 345 KUHP yang berbunyi "barang siapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, atau memberikan sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara dengan acaman penjara selama-lamanya empat tahun penjara".

Patut menjadi catatan, bahwa secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal 2 bentuk euthanasia, yaitu euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien

⁷ Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6, no. 1 (2015): 433.

atau korban itu sendiri dan euthanasia yang dilakukan dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pasien/korban sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 344 dan 304 KUHP. Pasal 344 KUHP secara tegas menyatakan: "Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."⁸

Contoh kasus yang terjadi di Indonesia terkait dengan euthanasia yaitu kasus Siti Juliaha, seorang pasien wanita yang telah koma selama setahun. Tidak sadarnya Siti Juliaha sejak menjalani operasi kandungan di sebuah rumah sakit Jakarta Timur. Suaminya, Rudi Hartono mengajukan permohonan euthanasia terhadap istrinya. Menurut pengakuan Rudi Hartono, pengambilan keputusan euthanasia merupakan keputusan keluarga besarnya yang merasa tidak tega melihat istrinya tersiksa terus. Keputusan ini semakin diperkuat setelah dia mendengar pernyataan seorang dokter Rumah Sakit Dokter Cipto Mangunkusumo yang menyatakan bahwa istrinya telah mengalami keadaan vegetatif state, tipis kemungkinan harapan Siti Juliaha untuk sembuh.

Kasus lainnya yaitu kasus Agian Isna Nauli pasien koma akibat sakit stroke oleh suaminya Panca Satriya Hasan mengajukan permohonan euthanasia terhadap istrinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasan pengajuan permohonan euthanasia tersebut adalah karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan sebagai orang miskin untuk membiayai pengobatan istrinya.⁹

Terkait dengan dua kasus tersebut diatas, sampai saat ini belum ada putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan apakah permohonan euthanasia tersebut diterima atau ditolak. Beberapa realitas di atas menunjukkan adanya kasus-kasus euthanasia yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Euthanasia adalah perdebatan klasik yang samapi saat ini masih menjadi topik

⁸ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, "Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016): 56–63.

⁹ Yudaningsih, "Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana," 433.

hangat yang membagi dunia dalam pro dan kontra. Indonesia adalah salah satu negara yang secara eksplisit tidak memiliki pengaturan tentang euthanasia, padahal beberapa kasus telah mencuat kepermukaan realitas sosial masyarakat. Masyarakat dan khususnya aparat penegak hukum membutuhkan pengaturan yang tegas tentang euthanasia sehingga terjamin kepastian hukum.

Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Penelitian (research) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, itu melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetapi bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.¹⁰

Penelitian yang dilakukan ini merupakan termasuk dalam lingkup penelitian pada disiplin Ilmu Hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tujuan penelitian hukum tidak lebih dari melakukan verifikasi terhadap kebenaran empiris. Morris L. Cohen dalam bukunya *“Legal Research”* berpendapat bahwa : *“Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society. It involves locating both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rules”*.¹¹

¹⁰ Pingkan K. Paulus Paulus, “Kajian Euthanasia Menurut HAM (Studi Banding Hukum Nasional Belanda),” *Jurnal Hukum UNSRAT* 21, no. 3 (2013): 879.

¹¹ Paulus, 879.

Untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan, maka diperlukan suatu pedoman atau metode penelitian. Hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian hukum ini adalah Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Melakukan penelitian hukum melalui perbandingan hukum. Jerome Hall memberikan patokan mengenai penelitian perbandingan hukum, yakni *"Comparative laws is a composite of social knowledge of positive law, distinguished by the fact that, in its general aspect, it is intermediate between the knowledge of particular laws and legal institutions, on the one side, and the universal knowledge of them at the other extreme"*. Perbandingan hukum senantiasa bertitik tolak pada paradigma teoritis maupun kerangka konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan dengan cara membaca, mengkaji, menelaah dengan teliti sumber data dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti mengenai kajian implementasi euthanasia menurut ulama dan menurut HAM dihubungkan dengan di Indonesia dan teori-teori hukum dan HAM.

Studi Komparasi (*comparative research*), yakni dengan cara membandingkan teori dengan fakta yang ada. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian tentang cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian diedit terlebih dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan mendasarkan pada pola pikir

deduktif dan induktif mengenai pelaksanaan euthanasia dan kajian euthanasia di Malaysia yang dikaji secara sistematis dengan dihubungkan dengan di Indonesia.¹²

Pembahasan

Euthanasia merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk membantu seseorang dalam mempercepat kematiannya secara mudah akibat ketidakmampuan menanggung derita yang panjang dan tidak ada lagi harapan untuk hidup atau disembuhkan. Hal tersebut memunculkan kontroversi yang menyangkut isu etika euthanasia (perilaku sengaja dan sadar mengakhiri hayat seseorang yang menderita penyakit yang tak dapat disembuhkan) karena menyangkut hak hidup manusia itu artinya juga menyangkut hak asasi manusia, yang mana isu ini menjadi kontroversi yang santer didiskusikan tidak hanya di kalangan dunia medis, akan tetapi telah merambah kemana-mana terutama para ulama Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Malaysia.

Euthanasia Menurut Pandangan Ulama di Indonesia

Kontroversi yang menyangkut isu euthanasia yang telah merambah ke kalangan para ulama Islam. Meskipun di dalam hukum Islam belum ada kejelasan atau ketidakpastian dalam menentukan apakah euthanasia termasuk jarimah atau bukan. Namun dalam hal euthanasia aktif yang dilakukan hanya berdasar inisiatif dokter sendiri tanpa adanya persetujuan dari pasien, merupakan pembunuhan dan pelaku dimungkinkan untuk dihukum sesuai dengan hukum jarimah yang ada. Pendapat demikian didasarkan atas pertimbangan karena perbuatan itu telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dilaksanakan dalam qishash (pemberian hukuman), antara lain: Pembunuh adalah orang yang baligh, sehat, dan berakal; ada kesengajaan membunuh; Ikhtiyar (bebas dari paksaan); pembunuh bukan anggota keluarga korban; dan jarimah dilakukan secara langsung.

¹² Paulus, 880.

Kehidupan dan kematian hanyalah Allah yang berhak menentukan. Penderitaan yang dialami manusia apapun bentuknya, tidak dibenarkan seorangpun merenggut kehidupan orang yang menderita tersebut khususnya melalui praktek euthanasia. Islam menganjurkan untuk selalu bersabar dan berprasangka baik serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. dalam menghadapi ujian kehidupan termasuk penyakit. Nabi saw. bersabda "Jika seseorang dicintai Allah maka ia akan dihadapkan kepada cobaan yang beragam". Jika manusia berputus asa dalam menghadapi penderitaan, maka Allah menjanjikan jalan keluarnya dalam QS. Az Zumar ayat 53 : "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Konsep euthanasia yang dirumuskan para ahli, sebenarnya ditemukan pula larangannya dalam Al-Quran dan Hadits. Misalnya dalam Al-Qur'an pada QS. Al- An'am ayat 151: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu sebab yang benar". Membunuh disini dapat diartikan membunuh dengan cara apapun termasuk membunuh dengan bantuan orang lain seperti konsep euthanasia aktif. Pembunuhan yang dikecualikan dalam ayat tersebut adalah pembunuhan yang dibenarkan seperti membunuh saat berperang dalam melawan kaum kafir. Penderitapun tidak berhak mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena berputus asa terhadap penyakit yang dideritanya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. An- Nisa ayat 29 yang berbunyi: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." Jadi hukum Islam dalam menanggapi euthanasia secara umum ini memberikan suatu konsep bahwa untuk menghindari terjadinya euthanasia, utamanya euthanasia aktif, umat Islam diharapkan tetap berpegang teguh pada kepercayaannya yang memandang segala musibah (termasuk penderita sakit) sebagai ketentuan yang datang dari Allah SWT.

Adapun ulama yang berpendapat bahwa penderita yang berpenyakit menular dan membahayakan orang lain jika dibiarkan hidup, hendaknya dilakukan alternatif tindakan lain selain euthanasia. Salah satunya adalah dengan mengisolasi penderita tersebut agar tidak berinteraksi dengan orang lain selama pengobatannya. Jika memang dokter menyatakan pasien tidak dapat disembuhkan dengan cara apapun, hendaknya diserahkan kembali kepada keluarganya bukan dengan mengakhiri hidupnya. Soal sakit, menderita dan tidak kunjung sembuh adalah *qudratullah*. Mempercepat kematian tidak dibenarkan karena tugas dokter adalah menyembuhkan, bukan membunuh.¹³

Telah disepakati oleh para ulama' bahwa suatu perbuatan barulah digolongkan sebagai jarimah apabila perbuatan itu dengan tegas dilarang oleh syara' (Hanafi: 14) yang menjadi unsur-unsur jarimah itu secara umum adalah:

1. Nash yang melarang perbuatan itu dan memberikan ancaman hukuman terhadapnya. Ini disebut sebagai unsur formal (*rukun shar'iy*).
2. Tindakan yang membentuk suatu perbuatan jarimah, baik perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini disebut unsur material (*rukun maddy*).
3. Pelaku mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang dilakukannya. Ini disebut rukun moral (*rukun adaby*).

Apakah euthanasia dapat dikatakan sebagai jarimah, atau tidak. Artinya, apakah Islam membenarkan tindakan euthanasia atau mengharamkan. Untuk menjawab persoalan ini, terlebih dahulu harus diketahui, apakah perbuatan ini memenuhi unsur-unsur jarimah di atas. Dari segi nash, Islam memang secara tegas melarang pembunuhan. Tetapi apakah euthanasia itu dengan begitu saja digolongkan sebagai pembunuhan? Sedangkan aspek tindakan sebagai unsur kedua sudah jelas ada, karena biasanya upaya untuk

¹³ Indrie Prihastuti, "Euthanasia Dalam Pandangan Etika Secara Agama Islam, Medis Dan Aspek Yuridis Di Indonesia," *Jurnal Filsafat Indonesia* 1, no. 2 (2018): 85–90.

mengurangi beban pasien dalam penderitaannya melalui suntikan dengan bahan pelemah fungsi saraf dalam dosis tertentu (neurasthenia).¹⁴

Euthanasia Menurut Pandangan Ulama di Malaysia

Dalam Islam masalah kematian manusia merupakan hak Allah SWT oleh karena itu, perbuatan yang mengarah kepada tindakan untuk menghentikan hidup seseorang itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum syariah. Allah SWT melarang perbuatan yang mengarah kepada kematian dengan cara apapun itu, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Termasuk hal euthanasia, karena tindakan pembunuhan secara euthanasia ini merupakan pembunuhan tanpa hak. Allah SWT adalah pemilik dan pemberi kehidupan kepada manusia, maka Dialah yang berhak memberi atau mengambil nyawa manusia. Membunuh diri dianggap sebagai salah satu tindak pidana dalam Islam dan ia adalah satu dosa besar. Firman Allah SWT yang artinya "Dan setiap makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah". (Q.S Ali-Imran: ayat 145).¹⁵

Menurut *First International Conference of Islamic Medicine* anjuran *Islamic Organisation of Medical Science* pada tahun 1981 di Kuwait telah menyatakan bahwa tidak ada suatu alasan yang pasti untuk mendukung euthanasia yang bertujuan untuk menghilangkan penderitaan dan rasa sakit. Jelaslah bahwa euthanasia adalah tindakan yang tidak akan dihalalkan di sisi agama Islam.¹⁶

Mufti Arab Saudi Shaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz telah menetapkan bahwa Euthanasia atau Qatl rahmah (menghentikan penggunaan alat pembantu orang sakit yang tidak mempunyai harapan sembuh atau dalam keadaan koma) adalah

¹⁴ Rahmat, "Euthanasia (suntik mati) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Supremasi Hak Asasi Manusia," 43.

¹⁵ Yusof, "Hanasia: Melanggar Etika dan Hak Asasi Manusia," 35.

¹⁶ Yusof, 37.

berlawanan dengan syara'. Pihak Mahkamah Tertinggi Arab Saudi yang diketuai oleh Sheikh Bin Baz memutuskan bahwa menentukan kematian seseorang yang penyakitannya sebelum ia benar-benar mati adalah bertentangan dengan syariah. Beliau berkata tidak ada satu nyawa pun yang boleh diambil dengan apa pun alasannya. Seterusnya Dr. Muzzami Siddiqi, mantan presiden Persatuan Masyarakat Islam Amerika Utara (*The Islamic Society of North America*) telah menulis, "Jika jika orang yang penyakitannya terus bergantung hidup pada alat pendamping nyawa, maka menghentikan alat tersebut dibenarkan untuk membiarkan seorang pesakit mati secara tabi'i, yaitu setelah mengambil pertimbangan dan penjagaan yang teliti sebelum mesin pendamping nyawa dihentikan."¹⁷

Euthanasia dalam Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak asasi manusia (HAM) berarti bicara tentang dimensi kehidupan manusia. Adanya Hak Asasi Manusia (HAM) berarti bukan karena diberikan oleh masyarakat atau kebaikan oleh negara, melainkan karena dirinya sebagai manusia, menandakan dia sebagai manusia ialah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Namun pentingnya bagi kita konsepsi HAM telah berkembang sedemikian rupa. Sehingga HAM menjadi objek yang menarik. HAM terus berkembang seiring dengan tuntutan manusia itu sendiri.¹⁸

Hak asasi manusia (HAM), dalam bahasa Inggris adalah *human rights*, dan dalam bahasa Perancis adalah *droits de l'homme* adalah sebuah yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya

¹⁷ Kiarash Aramesh dan Heydar Shadi, "Euthanasia: an Islamic ethical perspective," 2007, 21.

¹⁸ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 1.

dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil (misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat), serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik (seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan).

Dalam kenyataannya, menunjukan bahwa nilai-nilai HAM yang dikatakan universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman. Penafsiran hak asasi manusia misalnya, bisa diterapkan secara berbeda antara satu negara dengan negara lain, khususnya antara Islam dan Barat. Dalam penterjemahan *right to live* tiap-tiap negara memiliki penafsiran yang berbeda tentang seberapa jauh negara dapat menjamin *right to live* ini. Perjuangan terhadap *right to live* (hak untuk hidup) berkaitan dengan kebangkitan kembali hukum syari'ah atau hukum pidana Islam yang pada intinya ingin menghidupkan kembali undang-undang pidana Qur'ani sebagai hukum yang berlaku di setiap negara, yang berarti pemberlakuan kembali hukum *hadd*, jarimah *huddud* dan *qisas* dan hukumannya yang ekstrim dan tidak manusiawi khususnya hukum pidana mati.

Sebagian besar kaum muslim berpendapat bahwa sistem hukum pidana Islam harus memberlakukan hukuman atas kejahatan hadd, meliputi hukuman dera, rajam, potong tangan atau tangan dengan kaki, penyembelihan dan yang lebih ekstrem lagi adalah hukuman mati *qisas*.¹⁹

Sebagai landasan pembahasan masalah hak-hak asasi manusia (khususnya di Indonesia), tidak akan lepas dari Undang-

¹⁹ Abdullahi Ahmed An Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (New York: Syracuse University Press, 1996), 101–36.

undang Dasar 1945 sebagai dasar dari segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia serta harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya.

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 merupakan pengendapan dari cita-cita serta pengalaman bangsa Indonesia dalam memperjuangkan pergerakan kemerdekaan Indonesia untuk menghapus penjajahan. Oleh karena itu pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia pertama diawali dengan pernyataan sebagai berikut : “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.²⁰

Mengenai hak-hak asasi manusia, maka orang di seluruh dunia termasuk Indonesia akan merujuk kepada “*Universal Declaration of Human Rights*” yang dibentuk di Paris pada tanggal 10 Desember 1948. Mengenai “hak untuk hidup” telah diakui oleh dunia, karena telah dimasukkan dalam deklarasi tersebut sedangkan “hak untuk mati” atau *the right to die*, karena tidak secara tegas dicantumkan dalam suatu deklarasi dunia maka masih menjadi perdebatan sengit dan pembicaraan dikalangan ahli berbagai bidang di seluruh dunia.

Dalam kaitannya dengan euthanasia dijelaskan bahwa hak asasi manusia terutama hak untuk hidup murni dimiliki oleh setiap manusia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, hak tersebut wajib dijunjung tinggi dan merupakan hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Maka, dalam hal ini hubungan antara hak asasi manusia dan euthanasia disimpulkan bahwa hak untuk mati bukan bagian dari hak asasi. Mengakui hak untuk mati (dalam hal ini euthanasia) berarti sama dengan menghilangkan hak untuk melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hak-kewajiban asasi untuk melangsungkan kehidupan

²⁰ Anastasia Sarjono, “Kajian Sistem Hukum di Indonesia tentang Peraturan Tindakan Euthanasia” (Tesis, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018), 41.

yakni berkewajiban memelihara kehidupan manusia, agar manusia menurut kodratnya dapat hidup bersama dengan orang lain secara terus menerus.²¹

Euthanasia dilihat dari pandangan HAM merupakan pelanggaran karena sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ayat 1 yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya". Maka sulit apapun seseorang mempertahankan hidupnya, orang lain tidak bisa dengan mudah mengambilnya atau sesakit apapun seseorang orang lain wajib mengupayakan pengobatan terhadap penyakit yang dialami. Euthanasia merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau merupakan suatu tindak pidana. Karena perbuatannya itu mengakibatkan matinya orang lain, maka euthanasia itu merupakan tindak pidana pembunuhan. Dasar hukum untuk larangan euthanasia tercantum dalam pasal 344 KUH Pidana. Pasal tersebut berbunyi : "Barangsiapa menghilangkan nyawa orang atas permintaan sungguh-sungguh orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun".²²

Euthanasia terbagi kepada euthanasia sukarela, dan euthanasia tidak atas permintaan. Euthanasia atas permintaan adalah tindakan euthanasia yang dilakukan atas dasar permintaan, persetujuan atau izin dari keluarga pasien atau pasien itu sendiri. Sedangkan euthanasia tidak atas permintaan adalah euthanasia yang dilakukan oleh dokter tanpa adanya permintaan atau persetujuan pasien atau keluarganya. Jika pembagian euthanasia ini dikaitkan dengan bunyi pasal 344 KUHP tersebut diatas, maka euthanasiasukarela atau euthanasia atas permintaan lah yang memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 344 KUHP tersebut.

R. Soesilo dalam komentar atas pasal tersebut mengemukakan: "Permintaan untuk membunuh itu harus

²¹ Rindi Ramadhini, "Euthanasia Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia" (Disertasi, Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2009), 32.

²² Rosa Kumalasari, "Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM," *Literasi Hukum* 2, no. 1 (2018): 10.

disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh (*ernstig*) , jika tidak maka orang itu dikenakan pembunuhan biasa". Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa apabila seorang dokter memberikan suntikan yang mematikan kepada seorang pasien atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarganya, maka ia dianggap melakukan tindak pidana pembunuhan, dan diancam dengan hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun, sesuai dengan Pasal 334 KUHP. Tetapi apabila ia melakukan perbuatan tersebut atas inisiatif sendiri, tanpa adanya permintaan dari pasien atau keluarganya, maka ia dianggap melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja biasa dan ia dapat dikenakan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun, sesuai dengan pasal 338 KUHP, atau bahkan pembunuhan sengaja yang direncanakan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun, sesuai dengan Pasal KUHP 340 KUHP.²³

Dari bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain dengan cara apapun dan dengan alasan apapun sekalipun atas permintaan orang itu sendiri. sulit rasanya membayangkan seseorang yang sampai hati "membunuh" atau dengan perkataan lain "merampas nyawa" orang lain apalagi yang dikenalnya atau yang perlu ditolongnya, atas permintaan pasien yang menderita sakit parah dan tak tersembuhkan. Akan semakin sulit jika dikaitkan lenih lanjut dengan masalah moral dan kemanusiaan. Namun dalam masa-masa mendatang, karena sesuatu hal tidak mustahil permasalahan merampas nyawa orang lain yang sangat dikasihani atau yang perlu untuk ditolong atau membiarkan nyawanya dirampas maut atas permintaan yang bersangkutan, kiranya sulit dihindari.²⁴

Euthanasia dalam Hak Asasi Manusia di Malaysia

²³ Milithia Ch Y. Legi, "Euthanasia Ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia dan Peraturan Hukum Pidana," *Lex et Societatis* 4, no. 7 (2016): 51.

²⁴ Elsa Gloria Pangemanan, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pasien Euthanasia Di Indonesia," *Lex Et Societatis* 7, no. 6 (2019): 77.

Euthanasia melibatkan berbagai perspektif yang mempunyai maksud yang berbeda. Selain dari perspektif orang sakit, kadang kala penyakit yang dihadapi akan membawa rasa sakit dan penderitaan yang tidak dapat ditanggung oleh orang yang sakit tersebut. Oleh itu, kebanyakan pasien yang masih sadar mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk berputus asa dan memilih untuk mengakhiri hidupnya tanpa rasa sakit. Akan tetapi, sebaliknya para keluarga pasien dihadapkan dengan dilema untuk membuat keputusan jika pasien tersebut berada dalam keadaan koma. Dengan melaksanakan euthanasia, biaya berobat yang ditanggung oleh ahli keluarga dapat diringankan tetapi dalam masa yang sama akan timbul persoalan. Dalam proses pembuatan keputusan, para keluarga juga akan dihadapan dengan tekanan dari berbagai aspek, termasuk masyarakat, diri sendiri dan lain-lain. Manakala dari perspektif pengobatan, euthanasia memberi alternatif kepada pasien dan tindakan ini dapat mengakhiri hidup seseorang tanpa sakit dan menghentikan penderitaan.

Dokter memiliki peranan yang penting dalam isu ini karena kebanyakan merekalah yang mengambil keputusan ketika ada pasien yang layak untuk menerima euthanasia atau tidak. Tetapi pada masa yang sama, sebahagian pasien akan merasa takut sekiranya dokter yang merawatnya berpendapat bahwa pasien tidak dapat disembuhkan dan dokter akan melaksanakan euthanasia kepadanya. Keyakinan antara pasien dengan dokter mungkin akan berkurang ketika euthanasia dilaksanakan oleh dokter. Membenarkan euthanasia untuk pasien yang kuat yang meminta karena situasi di mana semua individu yang kuat akan merasa tertekan terhadap euthanasia. Terdapat kebimbangan bahwa pasien mungkin bermula melihat diri mereka sebagai beban atas keluarga mereka, teman-teman dan masyarakat. Penentang dari euthanasia juga menegaskan bahwa membenarkan individu untuk mengakhiri nyawa mereka boleh ketika dalam situasi tertentu seperti golongan yang sakit keras, orang yang sudah tua dan sudah tidak bisa melakukan aktivitas apapun dan itu harus dilakukan euthanasia sebagai mengikut peraturan atau undang-undang.

Eutanasia terjadi ketika manusia kehilangan rasa hormat kehidupan manusia itu sendiri. Jika manusia mengerti dan menghormati kesucian hidup maka mereka tidak akan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya seperti itu seperti itu. Bagi mereka yang mendukung implementasi euthanasia, mereka menerbitkan karya mereka sendiri dan membangunnya serikat tetapi sebagian besar menentang, mereka bertindak melalui diberlakukannya hukum. Ini terbukti bahwa masalah euthanasia tidak dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dan tindakan ini dianggap pembunuhan, meskipun tujuan awalnya adalah untuk mengakhiri hidup pasien yang tidak dapat menahan rasa sakit kritis. Oleh karena itu, manusia perlu bijak dalam menafsirkan dan menganalisis sebelum menerapkan dan mempraktikkan etika yang benar untuk menghindari menyebabkan hal-hal negatif terjadi yang bisa melanggar sifat manusia Islam dan syariah Islam.

Euthanasia dalam pandangan Hak Asasi Manusia merupakan hak atas pemeliharaan kesehatan dalam arti luas diakui umum sebagai hak sosial, satu dan lain karena pemeliharaan kesehatan (termasuk pelayanan kesehatan) sebagai sistem memberikan ruang dan peluang kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam kesempatan-kesempatan yang diberikan, disediakan atau ditawarkan oleh pergaulan hidup, Leenen menyebutkan hak-hak partisipasi (*participatie rechten*), dan isi hak-hak ini sedang berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat. Jadi hak dasar sosial ini mengandung tanggung jawab (bandingkan Pasal 29 *Universal Declaration of Human Rights*, yang berbunyi: "*Everyone has duties to the community*" dan seterusnya). Dan salah satu tanggung jawab ialah ikhtiar untuk mempertahankan hak-hak dasar individu, antara lain hak untuk menentukan nasib sendiri. Sesungguhnya hak atas pemeliharaan kesehatan mempunyai jangkauan yang luas sekali jika dibandingkan dengan hak atas pelayanan kesehatan, yang pada hakikatnya merupakan hak orang sakit, setidaknya-tidaknya hak orang yang mencari pelayanan kesehatan.

Dalam Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* tercantum ketentuan-ketentuan yang menyangkut hak-hak atas pemeliharaan kesehatan, yang secara tidak langsung berkaitan dengan hak atas pelayanan kesehatan, sebagai berikut: Pertama, Setiap orang berhak atas suatu taraf hidup, yang layak bagi kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya, termasuk didalamnya pangan, pakaian, dan pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial lainnya yang diperlukan. Hak-hak ini mencakup hak atas tunjangan dalam hal terjadi pengangguran, sakit, cacat, usia lanjut atau kehilangan mata pencaharian, yang disebabkan oleh situasi dan kondisi diluar kehendak yang bersangkutan. Kedua, Ibu dan anak mempunyai hak atas pemeliharaan dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang sah maupun diluar kawin, menikmati perlindungan sosial yang sama. Perlindungan terhadap kesehatan dirumuskan dalam Pasal 12 persetujuan definitif Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai berikut: Pertama, Negara-negara yang merupakan pihak dalam persetujuan ini mengakui hak setiap orang atas kesehatan tubuh dan jiwa, yang diupayakan sebaik mungkin. Kedua, Langkah-langkah yang diambil negara-negara yang merupakan pihak pada persetujuan ini, guna merealisasikan hak ini selengkap mungkin.

Secara teoretis relasi dokter-pasien ini dapat kita bagi dalam tiga jenis kontrak, yang dapat berakhir dengan suatu kontrak, sebagai berikut: Pertama, Hubungan dokter-penderita. Seseorang menemui dokter karena ia merasakan ada sesuatu yang mengancam kesehatannya. Nalurinya membisikkan bahwa ada gejala-gejala sakit dan penyakit yang sedang menggerogotinya. Orang lain pun dapat melihat bahwa seseorang tertentu dirundung sakit dan penyakit, dan memanggil atau menyuruh memanggil dokter. Dalam hubungan seperti ini dokter adalah dewa penyelamat. Kedua, Hubungan dokter-pesien. Seseorang pergi ke dokter berdasarkan gejala-gejala yang sudah diantisipasi (*self-milling prophecy*). Pasien telah mengetahui, atau setidaknya-tidaknya mengira telah mengetahui gejala-gejala tersebut dan dokter hanya menegaskan benar tidaknya asumsi tersebut. Ketiga, Hubungan dokter-konsumen. Relasi jenis ini pada

umumnya kita temui pada pemeriksaan medik preventif. Misalnya, seseorang pergi ke dokter atas kemauan pihak ketiga, yang mungkin saja negara, majikan, dan sebagainya. Dokter memeriksa orang yang disuruh pihak ketiga tersebut dan berikhtiar menemukan penyakit yang belum diketahui, menegakkan diagnosis, dan jika dianggap perlu diikuti oleh terapi. Sekalipun tujuan pertama adalah pemeriksaan preventif, namun tidak tertutup kemungkinan diikuti oleh tindakan-tindakan kuratif.

Right to self determination tidak bisa menjadi dasar untuk membenarkan praktek euthanasia bukan pelanggaran hak asasi manusia. Pada prinsipnya seorang pasien yang dalam keadaan koma atau kritis tidak berdaya, tidak bisa mempertahankan hak-haknya dan mengajukan pilihan hukum. Posisi yang lemah (*bargaining power*) dari pasien rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh dokter. Keterkaitan etika kedokteran dan HAM terutama menyangkut kewenangan dari dokter untuk menerapkan etika kedokteran atau perlindungan hak-hak asasi manusia pasien dalam praktek euthanasia. Pilihan dari dokter itu menentukan terlindungnya hak-hak hidup dari pasien. Kalau dokter memilih untuk mengedepankan etika kedokteran maka hak-hak hidup dari pasien sulit dilindungi. Perlindungan hak asasi manusia terhadap pasien dalam praktek euthanasia masih rentan dan belum jelas terutama menyangkut batasan-batasan pelanggaran HAM yang dilanggar oleh dokter dan batasan-batasan perlindungan terhadap pasien. Dalam praktek seringkali pasien menyerahkan kepada keluarga untuk menentukan nasibnya. Sikap keluarga atau orang-orang yang terdekat dari pasienlah yang sangat menentukan dilindunginya hak hidup dari pasien atau tidak.

Perbandingan Euthanasia menurut Pandangan Ulama dan Hak Asasi Manusia

Euthanasia adalah istilah yang didapati dalam dunia kedokteran, diartikan sebagai pembunuhan tanpa penderitaan terhadap pasien yang sedang kritis (akut) atau menderita penyakit menahun serta tipis harapannya untuk sembuh kembali. Seorang

pasien yang sedang sakit parah dan tidak sanggup lagi, lalu bermohon agar dokter mengakhiri hayatnya, maka dikabulkannyalah permohonan itu atas pertimbangan pasien tersebut tipis harapannya untuk dapat sembuh. Kalau pada orang seperti ini dimatikan maka kita melakukan euthanasia, yang sekarang ini tidak atau belum diterima di Indonesia, dan negara-negara lain pun masih ada yang belum menerimanya. Meskipun euthanasia itu juga demi rasa kemanusiaan yakni membebaskan orang yang hidup padahal tidak ada harapan lagi untuk hidup.

Manusia sebagai makhluk sosial selain mampu berfikir untuk maju juga mempunyai afeksi, simpati atau empati terhadap penderitaan manusia lainnya yang bisa menyebabkan timbulnya euthanasia. Dalam hal masalah euthanasia ini, para tokoh Islam Indonesia sangat menentang dilakukannya euthanasia. Namun diantara sekian banyak ulama yang menantang euthanasia ini, ada beberapa ulama.

Sejalan dengan definisi di atas, Yusuf al-Qarḍawi dalam salah satu karyanya mendefinisikan euthanasia sebagai tindakan memudahkan kematian: "Mempermudah kematian seseorang dengan tanpa rasa sakit, atas dasar belas kasih yang bertujuan untuk memberi keringanan terhadap penderitaan pasien, baik dilakukan secara aktif maupun dilakukan secara pasif".

Sebagaimana maklum dari pembahasan yang terdahulu bahwa secara umum euthanasia dibagi menjadi dua yaitu euthanasia aktif dan pasif. Dalam bab ini penulis ingin memaparkan hasil pengumpulan data tentang euthanasia aktif bila ditinjau dari sudut pandang para ulama.

Berkaitan dengan hal di atas Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa untuk memelihara jiwa dan menjamin kehidupan, maka diundangkan kewajiban untuk melakukan segala hal yang menjadi kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Begitu juga kewajiban *qis}a>s}*, diyat dan kaffārah atas orang yang melakukan pembunuhan dan melukai orang lain. Dan juga diharamkan menjatuhkan diri pada kerusakan dan diharuskan menolak bahaya yang menimpa dirinya.

ط - ع - ي - هـ - هم فيها - أ - من الذنوف بالذنف - وَا - من يال - هـ - من - وَا - نف
 يالاً نف - وَا - يالاً ذ - ن - وَا - السين يالسين - وَا - الجروح قصاص - فن
 ملق به - فهو كرامة - ط - من - ل - هم يحكم بما - أ - نزل الله ف - أ - و - لا - يملكهم
 الظالمون

Salah satu disyariatkannya agama Islam adalah untuk memelihara jiwa. Dalam memelihara jiwa ini manusia diperintahkan untuk melakukan upaya-upaya agar bisa mempertahankan kehidupannya. Maka dari itu mereka diperintahkan untuk makan, minum, bertempat tinggal dan berpakaian, semua perintah ini antara lain adalah untuk menjaga dan mempertahankan kehidupannya. Apabila mereka sakit, sayriat menganjurkan untuk berobat, dan dilarang untuk melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kematian. Disyariatkannya hukuman

qışos adalah salah satu bentuk perhatian dan kepedulian syariat Islam terhadap keberlangsungan hidup seseorang.²⁵

Perbandingannya antara euthanasia menurut ulama seperti penjelasan diatas dengan perbandingan euthanasia menurut perspektif HAM sebenarnya sama merupakan pelanggaran karena menyangkut hak hidup dari pasien yang harus dilindungi. Dilihat dari segi perundang-undangan dewasa ini, belum ada pengaturan yang baru dan lengkap tentang euthanasia. Adapun Pasal yang dapat dipakai sebagai landasan hukum guna pembahasan selanjutnya adalah apa yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, khususnya pasal-pasal yang membicarakan masalah kejahatan yang menyangkut jiwa manusia. Pasal yang paling mendekati dengan masalah tersebut peraturan hukum yang terdapat dalam buku ke-2, Bab IX Pasal 344 KUHP. Hak hidup harus dilindungi oleh negara terutama negara hukum. Itulah sebabnya negara hukum yang baik menjunjung tinggi hak asas manusia. Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan. Pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya yaitu melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi. Menyangkut jiwa manusia dalam KUHP terdapat pada Pasal 338, 339, 340, 341. Selain dapat membaca bunyi pasal-pasal itu sendiri, kita pun dapat mengetahui bagaimana pembentuk Undang-undang memandang jiwa manusia. Secara singkat, dari sejarah pembentukan KUHP dapat diketahui, bahwa pembentuk undang-undang pada saat itu (zaman Hindia Belanda) menganggap jiwa manusia sebagai miliknya yang paling berharga, dibandingkan dengan milik manusia yang lainnya.

Penutup

Euthanasia menurut ulama di Indonesia yang berpendapat bahwa penderita yang berpenyakit menular dan membahayakan

²⁵ Nida Rahmatillah, "The Views of The Indonesian Medical Association and The Council of Indonesian Ulama of Malang on Euthanasia" (Disertasi, Malang, UIN Maliki, 2017), 73.

orang lain jika dibiarkan hidup, hendaknya dilakukan alternatif tindakan lain selain euthanasia. Telah disepakati oleh para ulama' bahwa suatu perbuatan barulah digolongkan sebagai jarimah apabila perbuatan itu dengan tegas dilarang oleh syara'. Euthanasia dapat dikatakan sebagai jarimah jika telah memenuhi unsur-unsur jarimah. Karena euthanasia memenuhi unsur jarimah, maka Islam telah melarang tindakan tersebut.

Begitupun dengan Malaysia menyatakan bahwa tidak ada suatu alasan yang pasti untuk mendukung euthanasia yang bertujuan untuk menghilangkan penderitaan dan rasa sakit. Jelaslah bahwa euthanasia adalah tindakan yang tidak akan dihalalkan di sisi agama Islam.

Sedangkan euthanasia dilihat dari pandangan HAM merupakan pelanggaran karena sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ayat 1 yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya". Dan euthanasia merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau merupakan suatu tindak pidana. Karena perbuatannya itu mengakibatkan matinya orang lain, maka euthanasia itu merupakan tindak pidana pembunuhan. Dasar hukum untuk larangan euthanasia tercantum dalam pasal 344 KUH Pidana. Pasal tersebut berbunyi: "Barangsiapa menghilangkan nyawa orang atas permintaan sungguh-sungguh orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun".

Di Malaysia euthanasia yang dilihat dari HAM sebagian ada yang mendukung dan sebagian ada yang menentang. Bagi mereka yang mendukung implementasi euthanasia, mereka menerbitkan karya mereka sendiri dan membangunnya serikat tetapi sebagian besar menentang yaitu euthanasia tidak dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dan tindakan ini dianggap pembunuhan, meskipun tujuan awalnya adalah untuk mengakhiri hidup pasien yang tidak dapat menahan rasa sakit kritis.

Perbandingannya antara euthanasia menurut ulama seperti penjelasan diatas dengan perbandingan euthanasia menurut perspektif HAM sebenarnya sama merupakan pelanggaran karena

menyangkut hak hidup dari pasien yang harus dilindungi. Salah satu disyariatkannya agama Islam adalah untuk memelihara jiwa. Dalam memelihara jiwa ini manusia diperintahkan untuk melakukan upaya-upaya agar bisa mempertahankan kehidupannya. Dalam perspektif HAM sebenarnya sama merupakan pelanggaran karena menyangkut hak hidup dari pasien yang harus dilindungi.

Daftar Rujukan

- An Na'im, Abdullahi Ahmed. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. New York: Syracuse University Press, 1996.
- Aramesh, Kiarash, dan Heydar Shadi. "Euthanasia: an Islamic ethical perspective," 2007.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Haryadi. "Euthanasia dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Perspektif* XVIII, no. 2 (Mei 2013).
- Hayati, Nur. "Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kaitannya Dengan Hukum Pidana." *Lex Jurnalica* 1, no. 2 (2004): 17956.
- Kumalasari, Rosa. "Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM." *Literasi Hukum* 2, no. 1 (2018): 1–14.
- Legi, Milithia Ch Y. "Euthanasia Ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia dan Peraturan Hukum Pidana." *Lex et Societatis* 4, no. 7 (2016).
- Pangemanan, Elsa Gloria. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pasien Euthanasia Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 7, no. 6 (2019).
- Paulus, Pingkan K. Paulus. "Kajian Euthanasia Menurut HAM (Studi Banding Hukum Nasional Belanda)." *Jurnal Hukum UNSRAT* 21, no. 3 (2013): 879.
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja. "Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016): 56–63.
- Prihastuti, Indrie. "Euthanasia Dalam Pandangan Etika Secara Agama Islam, Medis Dan Aspek Yuridis Di Indonesia." *Jurnal Filsafat Indonesia* 1, no. 2 (2018): 85–90.

- Rada, Arifin. "Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam." *Perspektif* 18, no. 2 (2013): 108–117.
- Rahmat, H. "Euthanasia (suntik mati) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Supremasi Hak Asasi Manusia." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012.
- Rahmatillah, Nida. "The Views of The Indonesian Medical Association and The Council of Indonesian Ulama of Malang on Euthanasia." Disertasi, UIN Maliki, 2017.
- Ramadhini, Rindi. "Euthanasia Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia." Disertasi, Universitas Negeri Semarang, 2009.
- Sarjono, Anastasia. "Kajian Sistem Hukum di Indonesia tentang Peraturan Tindakan Euthanasia." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti. "Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6, no. 1 (2015): 43316.
- Yusof, Farahwahida Mohd. "Hanasia: Melanggar Etika dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Teknologi* 64, no. 1 (2013).